

Pemerintah Segera Buka Bandara Juanda

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, segera dibuka sebagai pintu masuk Indonesia. Pembukaan tersebut dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pelaku perjalanan internasional di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Pemerintah telah melakukan evaluasi ketat, salah satunya Bandara Juanda dijadikan sebagai alternatif pintu masuk dan pemenuhan kebutuhan logistik seluruh PPLN yang melakukan karantina di Surabaya," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (27/12).

Luhut juga menjelaskan pemerintah saat ini terus

berkoordinasi cepat. Sehingga Bandara tersebut bisa difungsikan.

"Jadi Surabaya sudah dicek ke lapangan dan nanti sore akan kami cek lagi. Karena itu harus kami bagi, karena kalau sampai masuk 6.000 di Jakarta akan repot," ungkapnya.

Luhut pun berharap dengan pembukaan Bandara Juanda tersebut dapat mengurangi kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga arus pelaku perjalanan dan internasional serta logistik dapat berjalan lancar.

"Perbaikan dilakukan karena sempat terjadi di bandara dan karantina (Jakarta). Jadi akan kami bagi Surabaya dan Jakarta," katanya. ● pra



JEMBATAN WAY GEBANG PESAWARAN PUTUS

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona (kiri) meninjau kondisi Jembatan Way Gebang yang putus di Desa Gebang, Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Senin, (27/12). Hujan deras pada Minggu malam (26/12) hingga Senin dini hari menyebabkan Sungai Way Gebang meluap dan mengakibatkan terputusnya jembatan yang menghubungkan Desa Padang Cermin, Batu Menyan, Gebang dan Hanura Pesawaran Lampung.

DUDUKI RUANG GUBERNUR BANTEN, 6 BURUH JADI TERSANGKA

Wahidin Buka Peluang Damai

Asep Abdulah Busro, kuasa hukum Wahidin, mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang bagi para tersangka untuk mengajukan keadilan restoratif (restorative justice). Menurut dia, pihak yang membuka peluang pengajuan keadilan restoratif adalah Wahidin.

SERANG (IM) - Pasca aksi buruh yang menduduki kantor Gubernur Banten, beberapa waktu lalu, 6 orang buruh kini ditetapkan menjadi tersangka.

Sebanyak 4 orang buruh ditetapkan tersangka karena perbuatannya menduduki bangku kerja Gubernur Banten dan juga mengangkat kaki, karena dianggap menghina terhadap suatu kekuasaan negara.

hadap suatu kekuasaan negara.

"Saat ini 4 tersangka dikenakan pasal 207 KUHP yaitu melakukan penghinaan secara umum terhadap suatu kekuasaan negara," ujar Kabidhumas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga, Senin (27/12).

Shinto mengatakan dua orang buruh lainnya ditetapkan tersangka karena melakukan perusakan.

"Dua tersangka lainnya dikenakan pasal 170 KUHP, yaitu perusakan secara bersama-sama terhadap barang," ujarnya.

Shinto menjelaskan untuk 4 buruh yang ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap suatu kekuasaan negara ada beberapa peristiwa yang dilakukan oleh tersangka, seperti menduduki bangku Gubernur dan mengangkat kaki di meja Gubernur.

"Ada beberapa peristiwa, ada duduk di bangku ada angkat kaki seperti itu. Itu hal hal yang dianggap menajutuhkan atau menghina kekuasaan di suatu negara," katanya.

Untuk diketahui Wahidin Halim resmi melaporkan buruh yang menduduki kursi

dan masuk ke ruang kerjanya. Laporan itu dilayangkan ke Mapolda Banten pada Jumat (24/12). Pelaporan dilakukan oleh pengacara Gubernur Banten, Asep Abdullah Busro.

Buka Peluang Restorative Justice

Asep Abdulah Busro, kuasa hukum Wahidin, mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang bagi para tersangka untuk mengajukan keadilan restoratif (restorative justice). Menurut dia, pihak yang membuka peluang pengajuan keadilan restoratif adalah Wahidin.

"Gubernur Banten (Wahidin) membuka peluang untuk restorative justice, yaitu penyelesaian jalan damai," ucap

Asep dalam keterangannya, Senin (27/12).

Di sisi lain, pihaknya mengembalikan soal ketentuan pengajuan keadilan restoratif kepada penyidik dari Polda Banten. "Namun, semua ketentuan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik Ditreskrim Polda Banten," kata Ade.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Shinto Silitonga berujar, keenam tersangka yang sudah ditangkap berinisial AP (46), SH (33), SR (22), SWP (20), OS (28), dan MHF (25). AP, SR, SWP, dan OS merupakan warga Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian, SH warga Cilegon, Banten, dan MHF warga Pandeglang, Banten. ● pra

Pulau Cangkir Dipadati Wisatawan, Polisi Perketat Pengamanan

TANGERANG (IM) - Wisatawan Kabupaten Tangerang ataupun dari luar daerah masih terlihat berbondong-bondong mendatangi Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo, Senin (27/12).

Kedatangan wisatawan tersebut selain memanfaatkan momen liburan bersama keluarga untuk berekreasi juga untuk berziarah ke makam leluhur yang ada di sana.

"Situasi yang ramai seperti saat liburan sekarang sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Untuk itu kami dari Polsek Kronjo melakukan pengamanan yang lebih ketat," kata Kepala Pos Pantau, Ipda Agus Susanto.

Ia mengatakan, setiap akses pintu masuk pulau cangkir telah dijaga oleh anggota kepolisian dibantu Dishub dan Satpol PP Kabupaten Tangerang.

"Kami lakukan pemeriksaan kepada seluruh pengunjung yang mau masuk ke Pulau Cangkir. Pemeriksaan mulai dari kendaraan dan barang-barang bawaan," ujarnya.

Hingga saat ini, lanjut Agus situasi Pulau Cangkir masih aman dan tidak terjadi tindak kejahatan.

"Alhamdulillah semua kondusif. Diharapkan situasi seperti ini bisa terus terjadi hingga musim liburan selesai," ungkapnya.

Agus juga mengimbau kepada seluruh wisatawan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Pasalnya, saat ini terdapat varian baru Covid-19 yakni Omicron.

"Kami lakukan pengawasan prokes yang ketat juga terhadap pengunjung. Kami bagikan masker dan selalu kami ingatkan untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan," pungkasnya.

Sementara itu, Kamto, warga Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang mengaku datang ke Pulau Cangkir untuk mengisi waktu liburan bersama anak-anaknya.

"Kesini bawa anak istri aja jalan-jalan. Kasihan anak-anak libur tapi tidak kemana-mana," pungkasnya. ● pp

SEDANG MENCARI IKAN

Nelayan Asal Sukabumi Jatuh dan Hilang di Perairan Cilograng Lebak

LEBAK (IM) - Seorang nelayan asal Lebak, Suparman (47) dilaporkan hilang di Perairan Cilograng, Kabupaten Lebak, Minggu (26/12) sore.

Suparman yang merupakan warga Kampung Cikadu, Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi itu diduga terjatuh dari perahu yang ia gunakan saat mencari ikan sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kami mendapatkan laporan bahwa ada seorang nelayan asal Sukabumi yang terjatuh dan hilang di perairan Cilograng, kemarin sore. Dan saat ini kita sedang melakukan pencarian terhadap korban," kata Kepala Kantor Basarnas Banten, Adil Trianto, Senin (27/12).

Ia pun menuturkan, bahwa kejadian sendiri bermula saat korban pergi melaut seorang

diri menggunakan perahu nya pada Sabtu (25/12) sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, keesokan harinya yakni Minggu (26/12) ada nelayan yang menemukan perahu korban dalam kondisi kosong dengan mesin yang masih menyala.

Nelayan itu pun langsung melaporkan hal tersebut kepada tim Basarnas Banten.

"Setelah mendapatkan informasi itu, unit SAR Lebak langsung melakukan proses penggalian informasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai lokasi temuan Perahu Nelayan, agar memudahkan pencarian terhadap korban," katanya.

Pihaknya pun saat ini tengah melakukan pencarian terhadap korban dan belum bisa memastikan kondisi korban. ● pra

Pemkab Serang Pastikan Pelayanan Hotel Laksanakan Prokes

SERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan monitoring pelayanan hotel di sekitar Kecamatan Anyer dan Cinangka. Hal tersebut untuk memastikan manajemen hotel melaksanakan protokol kesehatan (prokes) untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Kepala Satpol PP Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat mengatakan, monitoring dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Intruksi Bupati (Inbup) Serang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Natal dan Tahun Baru.

"Termasuk kami monitoring, pengecekan penerapan aplikasi Peduli Lindungi di hotel-hotel sepanjang Anyer-Cinangka," kata Ajat melalui keterangan tertulis, Senin (27/12).

Dalam proses monitoring, Satpol PP didampingi oleh aparaturnya

dari Kodim 0623/Cilegon dan kepolisian dari Polres Cilegon sebagai yang berwenang secara kewilayahan. Kemudian bersama pula Camat Cinangka dan Camat Anyer.

"Kami sebagai bagian dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mengoptimalkan kerja sama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 selama libur Natal dan Tahun Baru," ujar Ajat.

Ajat menegaskan, seluruh hotel di wilayah Anyer dan Cinangka, wajib menyediakan barcode Peduli Lindungi bagi setiap tamu yang datang.

"Tentu wajib juga menyediakan sarana protokol kesehatan. Kami cek seluruh hotel, dan wajib menjalankan Instruksi Bupati," ujarnya.

Menurutnya, seluruh hotel sudah mengetahui adanya Inbup Serang Nomor 17 Tahun 2021 melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang.

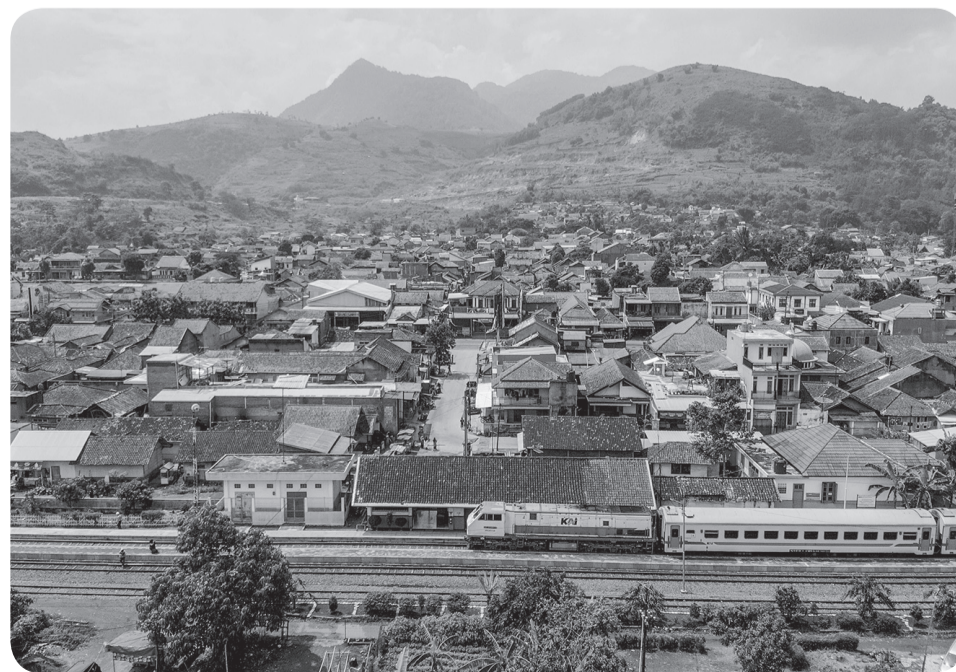
"Jadi tidak alasan untuk tidak melaksanakan. Semua wajib menjaga ketertarikan, kenyamanan, dan pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Ajat.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan, Ajat mengungkapkan, mayoritas hotel sudah menjalankan prokes dan menyediakan barcode aplikasi Peduli Lindungi.

"Aplikasi ini sudah digunakan oleh sekira 75 persen hotel wilayah Anyer dan Cinangka," ujar Ajat.

Bagi yang belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, Pemkab Serang memberikan panduan serta mendaftarkan akunnya. Siap mendampingi Diskominfo-satik dan Disporapar Kabupaten Serang.

"Bagi yang belum, kami akan cek kembali dan tindaklanjuti sampai semua hotel menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ini sudah menjadi perintah Bupati Serang yang harus dijalankan," ujarnya. ● pra



STASIUN KERETA API AKTIF TERTINGGI DI INDONESIA

Foto udara kereta api melintasi Stasiun Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (27/12). Stasiun Nagreg yang berada di ketinggian 848 meter di atas permukaan laut tersebut merupakan stasiun kereta api aktif tertinggi di Indonesia yang termasuk di wilayah Daerah Operasi II Bandung.



WAKSINASI COVID-19 DI TEMPAT WISATA

Pengunjung mendapat suntikan vaksin COVID-19 di tempat wisata Pantai Balongan Indah, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (27/12). Vaksinasi yang digelar Puskesmas Balongan itu menyasar pelaku wisata dan pengunjung untuk mengejar target vaksinasi COVID-19 hingga akhir tahun 2021.

Cegah Radikalisme, Kemenag Kab. Lebak Bangun Komunikasi Moderasi Beragama

LEBAK (IM) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, membangun komunikasi moderasi beragama di kalangan masyarakat agar menerima pemahaman agama yang benar sehingga mampu mencegah radikalisme dan terorisme.

"Kita berharap dengan moderasi beragama mampu memperkuat persatuan dan kesatuan," kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak, H Badru Salam di Lebak, Senin (27/12).

Kemenag Kabupaten Lebak awal 2022 akan membangun komunikasi moderasi beragama bertujuan untuk memahami ajaran agama dengan benar sehingga tidak melahirkan paham radikal dan teror.

Ajaran agama mana pun, katanya, tentu mengajarkan pada kebaikan, kebersamaan, kerukunan, toleransi, saling menghargai, dan menghormati dalam kehidupan di masyarakat.

Oleh karena itu, moderasi beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman perbedaan agama, suku, bahasa, sosial, dan budaya.

Namun, kata dia, di tengah perbedaan itu menjadi kekuatan untuk menjalin persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI dengan ideologi Pancasila.

Kemenag Lebak melaku-

kan pembinaan multikultural dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pemuka agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, dan Kepercayaan masyarakat Baduy.

Selain itu, katanya, Kemenag Lebak menggandeng pemerintah daerah untuk pencegahan paham radikal dan teror di daerah ini.

"Kita mengapresiasi kehidupan di Lebak yang masyarakatnya memiliki pluralisme, tetapi hingga kini tetap harmonis dan rukun tanpa terjadi gesekan sosial," katanya.

Bupati Lebak, Iri Octavia Jayabaya mengajak masyarakat di daerah ini mencegah pemahaman radikal dan teror, karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah daerah terus mengoptimalkan pencegahan pemahaman radikal dan teror dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), FKUB, dan Kemenag setempat.

Selain itu, ujar dia, pemerintah daerah terus menyoialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 339/1792/23 tentang Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Terorisme.

"Kami berharap masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi oleh kepentingan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Octavia. ● pra